

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ISSN : 2962-2948

E-ISSN : 2962-293X

Vol. 3 No.02

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3521>

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

Negara dalam Narasi: Analisis Framing Pemberitaan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada LKBN ANTARA dan Kompas

**Endika Fitra Wijaya, Reza Alerio Reihan, Adiba Nurkhafiza,
Yulianti Harmonis**

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: endikawi@gmail.com rezaalerio17@gmail.com adibanurkhafiza@gmail.com
yuliiiianti02@gmail.com

Abstract

This research analyzes the framing patterns of political news coverage by the Indonesian state news agency, LKBN ANTARA, in reporting on the Prabowo-Gibran administration, and compares it with the framing used by private media, Kompas.com. The study is motivated by ANTARA's position as an official state news agency, which holds a potential structural bias when reporting on the ruling government. This research employs a qualitative approach using Robert N. Entman's framing analysis method, comprising four elements: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Data were collected from online news reports published by ANTARA and Kompas.com between October 2024 and April 2025. The findings reveal that ANTARA tends to frame news affirmatively toward the government, emphasizing optimism and successful programs while providing minimal space for critical voices. In contrast, Kompas.com demonstrates a more pluralistic framing pattern, offering space for public criticism and expert analyses of government policies. This difference in framing significantly impacts the construction of public reality, where a single narrative from state media risks narrowing public discourse and reducing political literacy among the population. This research is one of the initial studies specifically examining the framing practices of state media regarding the Prabowo-Gibran administration and contributes to the development of political communication studies in Indonesia.

Keywords: Framing, ANTARA, Prabowo-Gibran, Political Media, Political Communication

PENDAHULUAN

Media massa memegang peranan strategis dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks dinamika politik Indonesia. Salah satu media yang memiliki posisi sangat unik adalah Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Sebagai kantor berita resmi milik negara, ANTARA memiliki mandat untuk menyebarkan informasi yang faktual dan berimbang. Namun, status ANTARA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai independensi redaksional lembaga ini dalam meliput isu-isu politik, khususnya ya yang berkaitan dengan pemerintah yang sedang berkuasa.

Konsep independensi media menjadi semakin relevan ketika melihat fenomena *political economy of media*, di mana struktur kepemilikan dan relasi ekonomi-politik dapat memengaruhi cara media melakukan konstruksi realitas sosial dalam pemberitaan mereka. Robert W. McChesney menekankan bahwa media modern tidak semata berfungsi sebagai saluran informasi publik, melainkan juga sebagai instrumen kekuatan ekonomi dan politik yang mampu menciptakan dominasi wacana tertentu dalam masyarakat. Herman dan Chomsky melalui *Propaganda Model* juga menegaskan bahwa media massa sering kali bertindak sebagai agen “*manufacturing consent*” yang membantu melegitimasi kebijakan pemerintah, terutama media yang secara struktural berada dalam lingkaran kekuasaan.

Fenomena ini menjadi sangat signifikan dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yang resmi dilantik pada Oktober 2024. Transisi kekuasaan selalu menjadi momentum penting bagi media untuk memainkan peran sebagai pengawas (*watchdog*) maupun sebagai alat legitimasi pemerintah. Dalam berbagai pemberitaan, ANTARA terlihat

lebih menekankan narasi positif dan afirmatif terhadap kebijakan pemerintah baru ini, mulai dari pidato pelantikan Presiden Prabowo, kebijakan ekonomi, hingga program-program strategis nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana ANTARA menjalankan fungsi jurnalistik yang independen atau justru berperan sebagai corong negara.

Fenomena framing tidak hanya terjadi pada media negara. Sementara itu, media swasta seperti Kompas.com sering menjadi representasi media yang lebih plural dalam menyajikan pemberitaan politik. Kompas.com tidak hanya memberitakan narasi resmi pemerintah, melainkan juga memberi ruang bagi suara oposisi, analisis para pakar, serta kritik masyarakat sipil. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam framing pemberitaan politik antara media pemerintah dan media swasta di Indonesia. Misalnya, Hasanah et al. menemukan bahwa pemberitaan pencalonan Prabowo–Gibran di Kompas.com lebih banyak memuat opini narasumber dan analisis kritis, sedangkan CNN Indonesia lebih dominan menggunakan data elektabilitas dan menahan opini kritis. Wardani et al. juga menemukan pola framing berbeda antara Kompas.com dan CNNIndonesia.com dalam pemberitaan Anies Baswedan, di mana CNNIndonesia.com lebih menekankan sisi negatif, sementara Kompas.com justru membingkai Anies sebagai sosok yang diinginkan oleh sebagian publik, khususnya komunitas buruh.

Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji framing pemberitaan ANTARA terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Padahal, ANTARA sebagai kantor berita negara memiliki jangkauan distribusi yang sangat luas, bahkan hingga ke daerah, sehingga framing yang dibangun ANTARA dapat memengaruhi konstruksi realitas publik secara nasional. Penelitian ini menjadi salah satu studi awal yang mencoba melihat lebih dekat

bagaimana media negara membingkai pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus membandingkannya dengan framing media swasta, yakni Kompas.com.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing pemberitaan ANTARA mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran, mengidentifikasi kecenderungan keberpihakan atau netralitas, serta membandingkannya dengan framing yang dilakukan oleh Kompas.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert N. Entman, yang menitikberatkan pada empat elemen utama yakni problem definition, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation dalam membentuk konstruksi realitas media.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing Robert N. Entman, yang terdiri dari empat elemen: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation. Data diambil dari pemberitaan daring ANTARA dan Kompas.com pada periode Oktober 2024 hingga April 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANTARA cenderung melakukan framing afirmatif terhadap pemerintah, menampilkan narasi optimisme dan keberhasilan program, serta minim suara kritis. Sebaliknya,

KAJIAN TEORI

Robert M. Entman (1993) mendefinisikan framing sebagai proses memilih beberapa aspek dari realitas yang dipersepsikan dan menjadikannya lebih menonjol dalam teks komunikasi. Menurutnya, framing memiliki empat fungsi utama, yaitu: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi. Dalam konteks artikel ini, teori

framing digunakan untuk menganalisis bagaimana media membingkai kebijakan dan narasi tentang pemerintahan Prabowo-Gibran, baik oleh LKBN ANTARA maupun Kompas

Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui media. Mereka menyatakan bahwa apa yang kita ketahui tentang dunia sebagian besar diperoleh melalui media massa. Dalam konteks ini, media berperan sebagai agen pembentuk realitas sosial, termasuk dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibra.

James Curran (2002) melihat media sebagai bagian dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Menurutnya, media tidak pernah benar-benar netral karena selalu merefleksikan atau mendukung kekuatan sosial dan politik yang dominan. Dalam konteks ini, LKBN ANTARA sebagai media negara cenderung menyuarakan narasi resmi, sedangkan Kompas sebagai media independen lebih bebas dalam membingkai wacana politik.

PEMBAHASAN

A. Framing Pemberitaan ANTARA

Hasil analisis terhadap pemberitaan ANTARA mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode Oktober 2024 hingga April 2025 menunjukkan kecenderungan pola framing yang afirmatif terhadap pemerintah. Sebagian besar berita ANTARA disusun dengan narasi optimistis, stabilitas, dan keberhasilan program, tanpa menyertakan opini kritis dari pihak lain.

Sebagai contoh, dalam pemberitaan berjudul Prabowo yakini Indonesia bisa keluar dari kemiskinan sebelum 2045 yang terbit pada 11 Juni 2025, ANTARA mengutip pernyataan Prabowo:

“Dengan sumber daya alam yang kita miliki, saya yakin kita akan keluar dari kemiskinan sebelum 2045. Kita harus optimistis.”

Isi berita hanya memuat pernyataan Presiden Prabowo, tanpa adanya kontras berupa kritik atau analisis dari pihak lain seperti ekonom, akademisi, atau tokoh masyarakat. Ini memperlihatkan pola framing single source narrative, di mana pemerintah diposisikan sebagai satu-satunya aktor penting yang menentukan solusi.

Fenomena ini sejalan dengan konsep manufacturing consent yang dikemukakan oleh Herman dan Chomsky, bahwa media yang berada dalam lingkaran kekuasaan cenderung membentuk opini publik untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui seleksi narasi yang hanya menampilkan sisi positif.

B. Framing Pemberitaan Kompas.com

Berbeda dengan ANTARA, Kompas.com memperlihatkan pendekatan lebih plural dan kritis dalam pemberitaan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kompas.com tidak hanya menampilkan narasi resmi pemerintah, tetapi juga memberi ruang bagi kritik dari berbagai aktor seperti ekonom, akademisi, dan politisi.

Sebagai contoh, Kompas.com dalam artikel berjudul *Ekonom Sebut Target Prabowo Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen Sulit Tercapai* pada 22 Oktober 2024 menuliskan:

“Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan target ekonomi 8 persen terlalu ambisius. Pemerintah perlu realistis agar beban subsidi tidak membengkak.”

Berita ini memperlihatkan bagaimana Kompas.com menghadirkan kontradiksi wacana terhadap pidato dan target pemerintah. Tidak hanya

mengutip pernyataan presiden, Kompas.com secara aktif menyuarakan perspektif kritis, sehingga membangun realitas yang lebih dialektis.

Kecenderungan framing Kompas.com ini sejalan dengan peran media sebagai watchdog, sebagaimana dijelaskan McChesney bahwa media independen semestinya menjadi ruang diskursus dan kontrol sosial terhadap kekuasaan.

C. Perbandingan Framing ANTARA vs Kompas.com

Perbedaan konstruksi realitas antara ANTARA dan Kompas.com dapat dilihat melalui tabel analisis empat elemen framing Entman berikut:

Elemen Entman	ANTARA	Kompas.com
---------------	--------	------------

Problem Definition	Pemerintah sebagai solusi untuk masalah Pemerintah sekaligus objek kritik publik	
--------------------	--	--

Causal Interpretation	Masalah eksternal, tantangan global berasal dari kebijakan pemerintah	Masalah juga
-----------------------	---	--------------

Moral Evaluation	Pemerintah diposisikan positif, heroik	
	Pemerintah dinilai perlu koreksi	

Treatment Recommendation	Mendukung kebijakan pemerintah	
	Mendorong transparansi, evaluasi kebijakan	

Sebagai ilustrasi, pada isu target penghapusan kemiskinan, ANTARA hanya menonjolkan pernyataan optimisme Prabowo:

“Prabowo meyakini Indonesia akan keluar dari kemiskinan sebelum 2045 berkat sumber daya yang melimpah.”

Sedangkan Kompas.com justru memuat headline:

“Ekonom Sebut Target Prabowo Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen Sulit Tercapai.”

Kontras ini memperlihatkan bagaimana dua media dengan karakter berbeda membangun konstruksi realitas yang berbeda pula. ANTARA menampilkan pemerintah sebagai aktor heroik dan solusi tunggal, sedangkan Kompas.com membuka ruang wacana kritis.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya analisis framing, bukan hanya untuk melihat apa yang diberitakan, tetapi juga apa yang dihilangkan (omission framing). Entman menegaskan bahwa framing bekerja bukan hanya melalui narasi yang ditonjolkan, melainkan juga melalui penghilangan suara-suara alternatif yang berpotensi mengganggu narasi dominan. G. Analisis Dampak Sosial-Politik

Perbedaan pola framing antara ANTARA dan Kompas.com dalam memberitakan pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki implikasi sosial-politik yang signifikan.

Pertama, framing ANTARA yang cenderung afirmatif terhadap pemerintah berpotensi menciptakan narasi tunggal di ruang publik. ANTARA, sebagai kantor berita negara, memiliki jaringan distribusi sangat luas hingga ke level media lokal. Banyak media daerah yang tidak memiliki sumber daya liputan sendiri hanya mengutip konten ANTARA secara utuh. Jika konten ANTARA dominan bersifat afirmatif tanpa suara kritis, maka publik di daerah berpotensi hanya menerima realitas politik versi pemerintah. Hal ini berisiko menyempitkan ruang diskursus publik dan mengikis fungsi media sebagai pilar demokrasi.

Kedua, framing afirmatif ANTARA juga dapat berdampak pada rendahnya literasi politik masyarakat. Herman dan Chomsky menekankan

bahwa media yang hanya menampilkan narasi tunggal dapat membuat masyarakat kehilangan kemampuan kritis untuk mengevaluasi kebijakan negara. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, di mana muncul kebijakan-kebijakan ambisius seperti target pertumbuhan ekonomi 8 persen atau penghapusan kemiskinan sebelum 2045, absennya suara kritis dalam pemberitaan ANTARA dapat menimbulkan euforia politik tanpa basis penilaian rasional. Padahal, kebijakan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Kompas.com sebagai media swasta memperlihatkan fungsi media yang lebih ideal dalam sistem demokrasi. Dengan membuka ruang kritik, Kompas.com menjalankan peran sebagai watchdog yang tidak hanya memberitakan klaim pemerintah, tetapi juga menguji klaim tersebut melalui pendapat ahli dan suara masyarakat. McChesney menyatakan bahwa media yang independen adalah benteng terakhir untuk mencegah konsentrasi kekuasaan politik yang berlebihan.

Namun demikian, adanya gap framing antara ANTARA dan Kompas.com juga dapat memunculkan fragmentasi publik. Masyarakat yang hanya mengonsumsi ANTARA akan memiliki persepsi berbeda dari mereka yang rutin membaca Kompas.com. Hal ini bisa memicu polarisasi persepsi politik, terutama menjelang pemilu atau saat terjadi kontroversi kebijakan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran media negara seperti ANTARA seharusnya lebih independen dalam mengelola narasi politik. ANTARA tidak dapat semata menjalankan fungsi sebagai humas pemerintah karena posisinya yang strategis sebagai sumber berita nasional. Jika tidak diimbangi dengan pemberitaan kritis, media negara berpotensi menjadi instrumen kekuasaan untuk membangun legitimasi politik secara sepihak,

mengurangi kualitas demokrasi, dan memperlemah kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan negara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ANTARA sebagai kantor berita negara cenderung membingkai pemberitaan pemerintahan Prabowo-Gibran secara afirmatif. Pemberitaan ANTARA menampilkan narasi stabilitas, keberhasilan, serta optimisme pemerintah, dengan minimnya ruang bagi suara kritis, oposisi, atau analisis akademis yang mempertanyakan kebijakan pemerintah. Hal ini memperlihatkan pola framing single source narrative yang selaras dengan konsep manufacturing consent yang dikemukakan Herman dan Chomsky, di mana media negara menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.

Sebaliknya, Kompas.com memperlihatkan pola framing yang lebih plural dan kritis. Media ini tidak hanya memuat pernyataan pemerintah, tetapi juga menghadirkan perspektif pengamat ekonomi, tokoh politik, dan masyarakat sipil yang mempertanyakan kebijakan pemerintah, seperti terlihat pada isu target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penghapusan kemiskinan sebelum 2045. Framing Kompas.com membentuk narasi dialektis, yang membuka ruang diskursus publik dan menjalankan fungsi media sebagai watchdog dalam sistem demokrasi.

Perbedaan framing antara ANTARA dan Kompas.com menegaskan bahwa konstruksi realitas politik di ruang publik Indonesia sangat bergantung pada karakter kepemilikan dan orientasi politik media. ANTARA, sebagai media negara, lebih berfokus pada membangun citra pemerintah sebagai aktor heroik, sedangkan Kompas.com berperan sebagai ruang deliberasi publik yang mempertanyakan klaim-klaim pemerintah.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi demokrasi di Indonesia. Jika framing media negara bersifat tunggal dan terlalu afirmatif, terdapat risiko penyempitan ruang diskursus publik dan rendahnya literasi politik masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang mengandalkan berita ANTARA sebagai sumber utama. Hal ini dapat melemahkan fungsi media sebagai pilar demokrasi.

Penelitian ini menjadi salah satu studi awal yang secara spesifik menganalisis framing pemberitaan ANTARA terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus membandingkannya dengan framing media swasta. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memperlihatkan bagaimana media negara dan media swasta membentuk konstruksi realitas politik yang berbeda, serta bagaimana perbedaan ini berpotensi memengaruhi persepsi publik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis yang dapat diajukan. LKBN ANTARA sebagai kantor berita negara disarankan untuk meningkatkan independensi redaksional dengan memperluas sumber pemberitaan, tidak hanya terbatas pada pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan kalangan akademisi, pengamat independen, serta masyarakat sipil. Hal ini penting agar pemberitaan ANTARA tidak terjebak dalam pola narasi tunggal yang hanya menonjolkan sisi afirmatif pemerintah, melainkan juga mampu menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjadi salah satu pilar demokrasi.

Selain itu, media daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan konten dari ANTARA secara utuh, tetapi juga melakukan verifikasi serta menambahkan perspektif lokal atau suara masyarakat setempat agar pemberitaan menjadi lebih berimbang dan mencerminkan keragaman pandangan publik.

Bagi pemerintah, penting disadari bahwa media negara bukan semata-mata corong kebijakan, melainkan memiliki tanggung jawab menyajikan informasi secara objektif. Pemerintah perlu memberikan ruang kebebasan editorial yang lebih besar kepada ANTARA agar kepercayaan publik terhadap media negara tetap terjaga.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka ruang untuk studi yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak media, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods. Hal ini bertujuan agar intensitas framing dapat terukur lebih objektif, sekaligus mengetahui sejauh mana framing media, khususnya media negara, memengaruhi persepsi politik masyarakat di Indonesia

Daftar Pustaka

- Ayu Wardani et al., "Framing Pemberitaan Calon Presiden pada Media Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Emerging Issues (New York: Monthly Review Press, 2008), 7-12.
Gibran: Analisis Framing pada Kompas.com dan CNN Indonesia (16–25 Okt 2023)
<https://ambon.antaranews.com/berita/272757/prabowo-yakini-indonesia-bisa-keluar-dari-kemiskinan-sebelum-2045>
<https://money.kompas.com/read/2024/10/22/062226526/ekonom-sebut-target-prabowo-tumbuhkan-ekonomi-8-persen-sulit-tercapai>
Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi (2024), 988-999.
Komunikasi (2023), 54-79.
Mareta Ushwatun Hasanah et al., "Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo—Online CNNIndonesia.com dan Kompas.com," 6(1) Jurnal Paradigm," 43(4) Journal of Communication (1993), 51-58
Political Economy of the Mass Media (New York: Pantheon Books, Political Economy of the Mass Media (New York: Pantheon Books, 1988), 2-5

Political Economy of the Mass Media (New York: Pantheon Books, 1988), 2-5

Robert N. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured

Robert N. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," 43(4) *Journal of Communication* (1993), 51-58

Robert W. McChesney, *The Political Economy of Media: Enduring Principles, Emerging Issues* (New York: Monthly Review Press, 2008), 7-12.

Robert W. McChesney, *The Political Economy of Media: Enduring Principles, Emerging Issues* (New York: Monthly Review Press, 2008), 7-12

Robert W. McChesney, *The Political Economy of Media: Enduring Principles,*